

**PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH
DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Ibnu Darpito
NIM : 20020610278
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : HAN
Tingkat : S1

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006**

i

**PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH
DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama : Ibnu Darpito
NIM : 20020610278

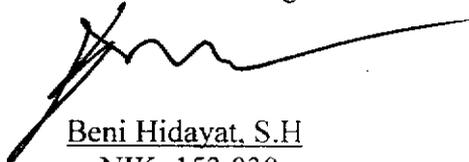
Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 Juni 2006

Dosen Pembimbing I



Nurwigati, S.H., M.Hum
NIK. 153.016

Dosen Pembimbing II



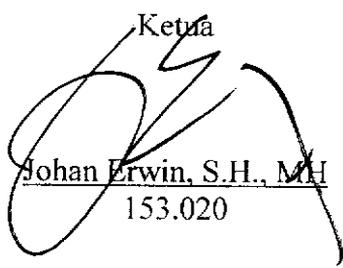
Beni Hidayat, S.H
NIK. 153.030

**PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH
DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 26 Juli 2006
yang terdiri dari :

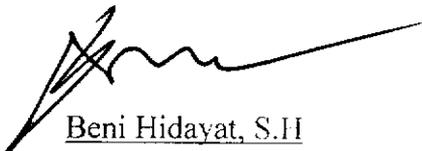
Ketua


Johan Erwin, S.H., M.H
153.020

Anggota


Nurwigati, S.H., M.Hum
NIK. 153.016

Anggota


Beni Hidayat, S.H
NIK. 153.030

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Muhammadiyah Yogyakarta




Dewi Nurul Musitari, S.H., M.Hum
NIK. 153.027

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanpa suatu halangan apapun.

Dengan keterbatasan yang dimiliki penulis namun penulis tetap mengupayakan tugas akhir ini dapat bermanfaat, paling tidak layak menjadi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun judul yang penulis ambil dalam skripsi ini adalah :

“PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DI KOTA YOGYAKARTA”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tugas akhir, sekaligus masa studi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dewi Nurul Mustjari, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Nurwigati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta masukan dan arahan yang sangat mendukung

penulis dalam membuat tugas akhir ini dengan penuh kebijaksanaan di sela aktifitas mengajar

3. Bapak Beni Hidayat, S.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta masukan dan arahan yang sangat mendukung penulis dalam membuat tugas akhir ini dengan penuh kebijaksanaan di sela aktifitas mengajar
4. Bapak Salman Luthan, S.H., MH selaku Ketua LOD Yogyakarta yang telah mendukung penulis dalam mengakses informasi mengenai LOD.
5. Bapak Budi Santoso, S.H., LLM selaku wakil ketua LOD Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan data-data yang diberikan dalam melengkapi penyusunan skripsi ini.
6. Ibunda tercinta SISWATI, dan mendiang Ayahanda SOPIAN BADAR yang ruhnya selalu hidup dalam jiwa dan sanubari penulis. Terima kasih atas segenap cinta dan kasih sayang yang telah mendidik penulis sejak kecil, serta dorongan doa yang membuat penulis tersadar akan perjuangan dan pengorbanan beliau yang memiliki andil besar dalam kehidupan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen FH UMY, yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik penulis selama dibangku kuliah.
8. Para pegawai tata usaha FH UMY terima kasih atas bantuannya.
9. Adik-adiku Yanti dan Muri semoga kalian menjadi generasi tangguh, yang bertanggung jawab serta memiliki peranan signifikan dalam kehidupan.

10. Nenekku Sutinah dan Kakekku Hardjo Wiyono yang telah mencurahkan kasih dan sayang kepada penulis serta seluruh keluarga yang telah mendukung penulis terima kasih atas nasehat dan sarannya.

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat, bagi penulis pada khususnya dan bagi pihak-pihak lain pada umumnya yang ingin melanjutkan penelitian yang penulis teliti. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

Yogyakarta, 28 September 2006

Ibnu Darpito

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN OMBUDSMAN	24
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	24
1. Pengertian Pengawasan	24
2. Tujuan Pengawasan	28
3. Norma Etika Pengawasan	30

4. Jenis-Jenis Pengawasan	33
5. Proses Pengawasan dan Standar Pengawasan	41
6. Obyek dan Sasaran Pengawasan	45
7. Prinsip dan Asas Pengawasan	45
8. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	48
B. Lembaga Ombudsman di Indonesia	50
1. Pengertian Komisi Ombudsman	57
2. Tugas dan Kewenangan Komisi Ombudsman.....	59
3. Mekanisme Kerja Ombudsman Nasional dan Lembaga Ombudsman Daerah	64
4. Alur Kerja Ombudsman dalam penanganan laporan masyarakat	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Tentang LOD Yogyakarta	67
B. Peranan LOD Yogyakarta Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintah di Kota Yogyakarta	71
1. Struktur Organisasi LOD Yogyakarta	71
2. Tujuan, Tugas dan Wewenang LOD Yogyakarta ...	76
3. Mekanisme Pengaduan ke LOD Yogyakarta	79
4. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan LOD	82
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan LOD..	94

BAB IV	PENUTUP	97
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran-Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Laporan Masyarakat Sebelum Juni s/d November 2005	83
Tabel 2	Klasifikasi Kasus, Sebelum Juni s/d November 2005	84
Tabel 3	Lembaga yang dilaporkan masyarakat (terlapor) Sebelum Juni s/d November 2005	86
Tabel 4	Tindak Lanjut Laporan	88
Tabel 5	Kasus yang terselesaikan di LOD Yogyakarta	89
Tabel 6	Kasus yang cepat terselesaikan	90
Tabel 7	Tahap akhir Penyelesaian Kasus LOD Yogya	91
Tabel 8	Frekuensi Permintaan Uang Aparat Penegak Hukum Terhadap Para Napi	92
Tabel 9	frekuensi permintaan uang dalam penanganan kasus	93